

DAFTAR PUSTAKA

- A. A. Mahendra. *Tugas dan Wewenang Jabatan PPAT Sementara*. Jakarta. Pustaka Ilmu. 2001.
- A. P. Parlindungan, *Komentar Undang-Undang Pokok Agraria*, Mandar Maju, Bandung, 1993.
- Abdulkadir Muhammad, *Hukum Perusahaan Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2010.
- Achmad Ali, *Menguak Teori Hukum (Legal Theory) dan Teori Peradilan (Judicialprudence) Termasuk Interpretasi Undang-Undang (Legisprudence)*. Kencana, Jakarta, 2017.
- Andy Hartono, *Panduan Lengkap Hukum Praktis Kepemilikan Tanah*, Laskbang Yustisia, Surabaya, 2015.
- Burhan Ashshofa, *Metode Penelitian Hukum*, Penerbit Rineka Cipta, Jakarta, 2010.
- Bernhard Limbong, *Hukum Agraria Nasional* , Margaretha Pustaka, Jakarta, 2012.
- Boedi Harsono, *Menuju Penyempurnaan Hukum Tanah Nasional dalam Hubungannya dengan TAP MPR RI IX/MPR/2001*, Universitas Trisakti, Jakarta, 2003
- G.H.S. Lumban tobing, *peraturan jabatan notaris*, cetakan keempat Erlangga, Jakarta, 1996.
- Ghansham Anand, *Karakteristik Jabatan Notaris Di Indonesia*, Kencana Prenada Media, Jakarta, 2017.
- H.Salim HS, *Teknik Pembuatan Akta Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT)*, PT. Rajagrafindo persada, Jakarta, 2016.
- _____, *Peraturan Jabatan dan Kode Etik Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT)*, Jakarta: Rajawali Pers, 2019
- Habib Adjie, *Hukum Notaris Indonesia, Tafsir Tematik terhadap Undang-Undang No. 37 Tahun 1998 tentang Notaris*. Cetakan kelima, Refika Aditama, Surabaya. 2018.
- Hadi Setia Tunggal, *Himpunan Peraturan Pendaftaran Tanah*, Harvindo, Jakarta, 2008
- Hans Kelsen (a) ,*General Theory Of law and State , Teori Umum Hukum dan Negara, Dasar-Dasar Ilmu Hukum Normatif Sebagai Ilmu Hukum*

- Deskriptif Empirik*, (terjemahan somardi), BEE Media Indonesia, Jakarta, 2007.
- _____, (b), (b), *Teori Hukum Murni*, (terjemahan Raisul Mutaqien), Nuansa & Nusa Media, Bandung, 2006.
- Irma Devita Purnamasari, *Hukum Pertanahan*, Mizan Pustaka, Bandung, 2010
- Irwansyah, *Penelitian hukum, pilihan metode dan praktik penulisan artikel*. Edisi revisi. Miira buana media. 2020
- Irwan Permadi, *Unifikasi dan Pluralisme Hukum Agraria*, Genta Publishing, Yogyakarta, 2010
- Ilyas Ismail, *Konsepsi Hak Garap Atas Tanah*, Ciptapustaka Media Perintis, Bandung, 2011.
- J. Andy Hartanto, *Hukum Pertanahan*, LaksBang Justitia, Surabaya, 2014.
- Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Burgerlijk Wetboek)*, diterjemahkan oleh R.Subekti, Pradnya Paramita, Jakarta, 2004.
- Koesnadi Hardjasoemantri, *Hukum Tata Lingkungan*, edisi ke-8, Gajah Mada University Press, Yogyakarta, 2018.
- M.H. Tirtaamidjaya, *Pokok-Pokok Hukum Pidana*, Penerbit Fasco, Jakarta, 1995.
- Maria S. W. Sumardjono, *Kebijakan Pertanahan antara Regulasi dan Implementasi*, Kompas, Jakarta, 2005.
- Marwan Mas, *Pengantar Ilmu Hukum*, Ghalia Indonesia, Bogor, 2003
- Muhammad Yamin, *Beberapa Dimensi Filosofis Hukum Agraria*, Pustaka Bangsa Press, Medan, 2003
- R. Soeroso, *Pengantar Ilmu Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 1993
- Soekidjo Notoatmojo, *Etika dan Hukum Kesehatan*, Rineka Cipta, Jakarta, 2010.
- Soedjono Dirdjosisworo, *Pengantar Ilmu Hukum*, PT. Raja Grafindo Tinggi, jakarta, 2010
- Sudikno mertukosumo, *Hukum acara perdata Indonesia*, edisi ke-8 cet. 1, liberty, Yogyakarta, 2009.
- _____, (untuk selanjutnya akan disebut Sudikno Mertokusumo I), *Mengenal Hukum Suatu Pengantar (Edisi Revisi)*, Cahaya Atma Pustaka, Yogyakarta, 2016.

Supriadi, *Hukum Agraria*, Sinar Grafika, Jakarta, 2008,

Titik Triwulan dan Shinta Febrian, *Perlindungan Hukum bagi Pasien*, Prestasi Pustaka, Jakarta, 2010.

Urip Santoso, *Hukum Agraria Kajian Komprehensif*, Prenada Kencana Media Group, Jakarta, 2012,

Jurnal

Akhmad, S. N., *Kekuatan Akta Autentik Yang Dibuat Oleh Notaris Untuk Pembuktian Terhadap Tindak Pidana Pemalsuan*. Jurnal Hukum Dan Kenotariatan, vol 3 no.1, 2019.

Hendry Dwicahyo Wanda dan Rusdianto Sesung. *Prinsip Kehati-Hatian Pejabat Pembuat Akta Tanah Dalam Pengurusan Peralihan Tanah Letter C*. Jurnal. Surabaya. Universitas Narotama Suarabaya. 2018

Made Anggara Giri. *Pelaksanaan Peralihan Hak Milik Atas Tanah Karena Jual Beli Di Hadapan Camat Sebagai PPAT Sementara Setelah Berlakunya Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Di Kabupaten Tulang Bawang Barat Provinsi Lampung*. Lampung. Jurnal. Universitas Atma Jaya Yogyakarta.2013

Pebry dirganaara, *Tanggung Jawab Saksi Pengenal Terhadap Keterangan yang Diberikan dalam Pembuatan Akta Autentik*, akta comitas, jurnal hukum kenotariatan, Vol 4 No.2, 2019.

Renhat Marlianus Siki, I Gusti Nyoman Agung, I Nyoman Darmadha, *kelayakan saksi dalam pembuatan akta jual beli hak Milik atas tanah oleh pejabat pembuat akta tanah*, Kertha Semaya, Vol 02 NO. 5 tahun 2014.

Sigit DwiSantoso., Moh.Saleh, *Kekuatan Hukum Akta Jual Beli Tanah yang Dibuat PPAT (Studi Kasus Putusan Kasasi MA No. 787 K/Pdt/2013)*. Al-Qānūn. Vol. 21 No. 1. Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya. Kota Surabaya, 2018.

Disertasi

Antje M. Ma'moen, *Pendaftaran Tanah Sebagai Pelaksana UUPA Untuk Mencapai Kepastian Hukum Hak Atas Tanah di Kota Madya Bandung*, Disertasi, Universitas Padjajaran Bandung, 1996

Tesis

Didik Ariyanto. *Pelaksanaan Fungsi Dan Kedudukan Camat Sebagai Pejabat Pembuat Akta Tanah Sementara Di Kabupatn Gobraongan*. Semarang. Tesis. PPS Universitas Diponegoro. 2006

Hanna Nathasya Rumia Hutapea, *kedudukan saksi instrumenter dalam Pembuatan akta notaris dalam hukum nasional*, Tesis, Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara, 2015

Djoko Poernomo. *Kedudukan dan Fungsi Camat Sebagai Pejabat Pembuat Akta Tanah*. Surabaya. Tesis. PPS Universitas Airlangga. 2006

Website

Kamus Besar Bahasa Indonesia diakses dari <http://kbbi.web.id/>. 2022.

Kusumasari, Diana. *Teori Kepastian Hukum*. Gramedia Blog. di akses di Website: www.gramedia.com/literasi/teori-kepastian-hukum. 2022.

Mega nugraha, *Terima honor melebihi ketentuan kades di amankan tim saber pungli*. tribun jabar di akses Website: www.jabar.tribunnews.com. 2022.